

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya Perang Dunia II memberikan dampak yang sangat signifikan bagi keamanan kawasan Asia Timur, dimana Jepang sebagai negara yang menguasai Asia Timur mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Sebelumnya, Jepang merupakan negara yang sangat agresif dan konfrontatif dengan melakukan invasi militer hampir di semua negara Asia Pasifik (Mardialina, 2013). Namun, pasca kekalahannya dalam Perang Dunia II, Jepang menerapkan Kebijakan Pasifisme yang berarti bahwa Jepang akan menjadi negara yang cinta damai dan menentang adanya perang (Juwana, 1992). Seperti yang telah diatur dalam Pasal 9 Konstitusi, Pemerintahan Jepang tidak memiliki Departemen Pertahanan dan tidak boleh memiliki pasukan militer kecuali pasukan bela diri yang disebut dengan SDF (*Self Defence Force*) (Andhika, 2013). Dengan konstitusi yang tidak mengizinkan untuk memiliki kekuatan militer, Jepang berlindung di bawah payung keamanan Amerika Serikat, dan kedua negara melakukan perjanjian kerjasama keamanan (Jones, 2019). Dalam kerjasamanya tersebut, Amerika Serikat menjadikan Jepang sebagai negara yang menopang hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik (Arianto, 2010).

Selesainya Perang Dunia II yang diharapkan dapat menjadi awal dari perdamaian dunia, nyatanya justru melahirkan sebuah konflik baru yang disebut “Perang Dingin”. Perang ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet ini juga sangat berdampak terhadap keamanan di Asia Timur, dimana wilayah Korea terpecah menjadi dua bagian, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan (Oktorino, 2013). Ancaman komunis yang sangat nyata dalam Perang Dingin, membuat Amerika Serikat mempererat hubungan militernya dengan Jepang dan memanfaatkannya sebagai alat untuk melawan agresi komunis di Korea. Setelah Perang Dingin berakhir, situasi keamanan dan politik di kawasan Asia Timur mengalami

perubahan yang cukup signifikan. Asia Timur menjadi kawasan yang mempunyai peranan penting dalam hubungan internasional. Meskipun demikian, Asia Timur menjadi kawasan yang rentan akan konflik, terutama antara tiga negara yang memiliki permasalahan sejarah masa lalu, yaitu Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Ketiga negara tersebut memiliki hubungan historis yang sangat kelam, dimana Jepang bersikeras untuk tidak mengakui kejahatan yang telah dilakukannya selama Perang Dunia II (Purwanto, 2010).

Persaingan yang terjadi antara Jepang, Cina, dan Korea Selatan membuat mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensinya dan memperkuat pengaruhnya, baik itu di kawasan maupun di dunia internasional. Hal ini dibuktikan oleh Cina yang berusaha memperkuat pengaruhnya di kawasan dengan melakukan modernisasi militer. Kebijakan Pemerintah Cina dalam meningkatkan kapabilitas militernya yang dilakukan secara tidak transparan telah menarik perhatian dari dunia internasional, khususnya kawasan Asia Timur.

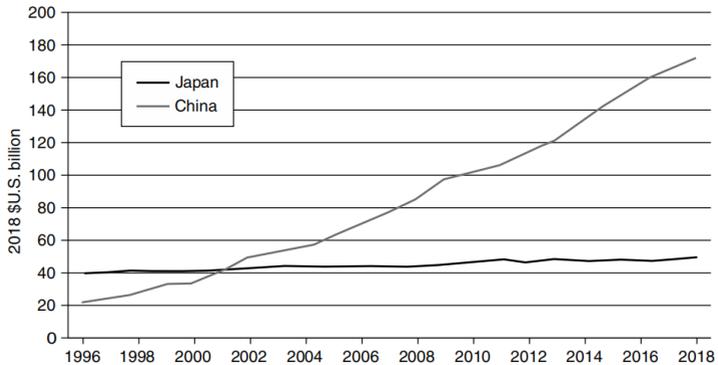
Selain meningkatkan anggaran belanja militer setiap tahunnya, Cina juga melakukan kebijakan reformasi militer, dimana jumlah tentara akan dikurangi sebanyak 300.000 personil dengan tujuan untuk menciptakan tentara profesional yang siap tempur (As/yf, 2016). Oleh karena itu, negara-negara Asia Timur sangat mencemaskan peningkatan kapabilitas militer yang telah dilakukan oleh Cina, terutama Jepang. Selain mempunyai sejarah masa lalu yang kelam, Jepang dan Cina masih terlibat konflik yang masih berjalan sampai sekarang, yaitu sengketa atas kepulauan *Senkaku* di Laut Cina Timur yang membuat hubungan diplomatik antara kedua negara kerap kali mengalami ketegangan. Meskipun tidak berpenghuni, namun pulau *Senkaku* memiliki populasi ikan yang besar dan mengandung sumber daya minyak bumi yang berlimpah, sehingga diperebutkan oleh Jepang dan Cina (Roza, 2012).

Jepang menganggap bahwa peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Cina sebagai permasalahan utama keamanan di kawasan Asia Timur (Syahrin, 2018). Jepang merasa bahwa kebijakan militer Cina telah memberikan ancaman yang serius bagi Jepang, bukan hanya mengancam

keamanan nasionalnya, namun juga mengancam kepentingan nasional Jepang di kawasan dan di dunia internasional (Lee, 2014). Menanggapi hal tersebut, Cina menyatakan bahwa modernisasi militer yang dilakukannya merupakan kebijakan yang normal dengan tujuan untuk memperkuat militer nasionalnya, bukan bermaksud untuk menyerang atau mengancam kawasan (*offensive*). Cina menyebut bahwa dirinya telah memiliki komitmen untuk ikut serta dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, sehingga Cina perlu memperkuat kapabilitas militernya sesuai dengan kondisi dunia internasional saat ini (Purwanto, 2010).

Pertumbuhan ekonomi Cina yang sangat pesat ternyata telah berdampak langsung terhadap keamanan Jepang. Sejalan dengan pertumbuhan ekonominya, Cina telah meningkatkan anggaran militernya sebanyak 724 persen dari tahun 1996 sampai tahun 2018 menjadi sekitar \$173 miliar. Sedangkan Jepang, hanya mengalami pertumbuhan sebesar 24 persen dengan jumlah \$49 miliar atau kurang dari sepertiga anggaran militer Cina (Heginbotham, 2018). Jumlah tersebut membuat Cina menempati posisi pertama sebagai negara dengan total anggaran belanja militer terbesar di kawasan Asia Pasifik, dan berada di urutan kedua dunia setelah Amerika Serikat (SIPRI, 2019). Gambar di bawah ini menunjukkan grafik perbandingan jumlah anggaran militer Jepang dengan Cina dari tahun 1996-2018 (Heginbotham, 2018) :

Grafik 1. Jumlah anggaran militer Jepang dan Cina tahun 1996-2018



Sumber : Heginbotham, E. d. (2018). Active Denial: Redesigning Japan's Response to China's Military Challenge. *International Security*, 42 (4), 128-169.

Kebijakan peningkatan kapabilitas militer Cina telah membuat rivalitas antara Jepang dengan Cina dibaratkan sebagai “Perang Dingin Asia Timur” (Tiezzi, 2014). Jumlah anggaran militer Cina yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Jepang, membuat hubungan diplomatik keduanya kembali mengalami ketegangan. Sebelumnya, Jepang telah merespon peningkatan kapabilitas militer Cina dengan melakukan amandemen panduan pertahanannya pada tahun 2005. Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 9 dalam NDPO (*National Defence Program Outline*), Jepang diizinkan menggunakan militernya untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Amandemen ini juga memberikan pengesahan kepada SDF untuk lebih aktif dalam menjalin aliansi pertahanan dengan negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat (Calder, 2006).

Seiring dengan berjalannya waktu, peningkatan kapabilitas militer Cina semakin meresahkan Jepang, pasalnya hal itu telah menyebabkan naiknya intensitas Cina di pulau Senkaku. Contohnya pada bulan Agustus 2016, Cina mengirim sebanyak 300 kapal penangkap ikan dikawal oleh 15 kapal

bersenjata untuk mengitari kepulauan *Senkaku* selama seminggu (Graham-Harrison, 2017). Selain itu, untuk pertama kalinya Cina mengirim pesawat tempur tak berawak di sekitar kepulauan *Senkaku* pada tahun 2017. Hingga 31 Maret 2017, Jepang telah mendapati pesawat Cina sebanyak 1.168 kali, atau rata-rata sebanyak tiga kali sehari (Ogura, 2017). Pada tahun 2018, Cina kembali melakukan gerakan, yaitu dengan mengirim kapal perang yang berlayar mengelilingi kepulauan *Senkaku* (Suastha, 2018). Jepang menyatakan bahwa Cina telah meningkatkan situasi secara sepihak, dan ini sama sekali tidak dapat diterima oleh Jepang.

Melihat kenyataan tersebut, menjadi perlu untuk Jepang memberikan respon terhadap apa yang telah dilakukan oleh Cina. Bagi Jepang, peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Cina merupakan penyebab utama yang memicu terjadinya ketegangan di kawasan. Selain dapat mengancam eksistensi Jepang di kawasan, militer Cina yang semakin kuat juga dapat mempengaruhi konflik yang terjadi antara Jepang dan Cina dalam sengketa kepulauan *Senkaku* (Syahrin, 2018). Kenyataan bahwa Jepang memiliki konstitusi yang memberi batasan dalam menggunakan militernya, membuat Jepang tidak dapat melakukan penyerangan atau perlawanan yang berarti terhadap Cina. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk mengkaji bagaimana sesungguhnya respon yang diberikan oleh Jepang terhadap Cina, mengingat Jepang tidak dapat berbuat banyak dengan militernya, sedangkan peningkatan kapabilitas militer Cina memiliki potensi yang dapat memperburuk hubungan bilateral kedua negara, bahkan dapat memicu terjadinya perang antara Jepang dengan Cina.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah **“Bagaimana Respon Jepang terhadap Peningkatan Kapabilitas Militer Cina Tahun 2016-2018?”**

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tentang bagaimana respon Jepang terhadap peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Cina pada tahun 2016-2018.

D. Kerangka Konseptual

1. Konsep *Security Dilemma*

John Herz merupakan orang pertama yang mengemukakan konsep *security dilemma* dalam jurnalnya yang berjudul “*Idealist Internationalism and the Security Dilemma*” (Tang, 2009). Herz menyatakan bahwa negara yang berada di bawah sistem anarki harus memperhatikan keamanan negaranya, baik dari ancaman, serangan, maupun intervensi dari negara lain, terutama negara tetangga. Peningkatan militer yang dilakukan oleh suatu negara dapat membuat negara lain merasa tidak aman dan terancam, sehingga memaksa mereka untuk bersiap menghadapi kemungkinan yang terburuk, karena sejatinya tidak ada satupun negara yang dapat merasa aman sepenuhnya di dunia yang penuh persaingan ini. Hal tersebut menyebabkan munculnya *vicious circle of security* (lingkaran setan keamanan) yang dikarenakan oleh persaingan kekuasaan dan peningkatan kekuatan yang terus dilakukan satu sama lain (Herz, 1950). Oleh karena itu, negara dituntut untuk dapat meningkatkan kekuatannya agar mampu menghindari hal-hal yang dapat membahayakan negaranya.

Konsep *security dilemma* dijelaskan secara sederhana oleh Robert Jervis sebagai keadaan ketika suatu negara melakukan peningkatan militernya, maka akan menyebabkan keamanan negara lain, terutama negara tetangganya menjadi menurun (Jervis, 2017). Dalam hubungan internasional, *security dilemma* muncul akibat suatu negara melakukan tindakan yang memperkuat sistem pertahanan dan keamanannya, namun dilihat sebagai sebuah ancaman oleh negara

lain. Peningkatan pertahanan dan keamanan yang dilakukan secara otomatis akan memunculkan sebuah kecurigaan dari negara tetangganya (Bangun, 2017). Ancaman yang dirasakan kemudian akan menyebabkan negara tetangga untuk melakukan peningkatan kekuatan juga, seperti meningkatkan kekuatan militer ataupun ber-aliansi dengan negara lain. *Security dilemma* mampu memaksa suatu negara untuk ber-aliansi dengan negara lain, atau memperkuat aliansi yang telah terbentuk sebelumnya (Gafur, 2017). Aliansi menjadi penting karena dapat menambah *power* yang dimiliki oleh suatu negara. Selain meningkatkan kekuatan nasional, aliansi dipercaya dapat membendung ancaman yang datang dari negara lain.

Security dilemma kerap kali terjadi di berbagai kawasan, seperti kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Timur. Ketegangan yang muncul antara Jepang dengan Cina merupakan salah satu contoh dari adanya *security dilemma*. Jepang melihat bahwa kapabilitas militer Cina yang terus meningkat setiap tahunnya telah memaksa Jepang untuk ikut serta dalam memperkuat kapabilitas militernya, salah satunya adalah mempererat kerjasama militernya dengan Amerika Serikat sebagai efek dari *security dilemma* (Satris, 2015). Jepang dan Amerika Serikat adalah dua kekuatan militer terdekat di dunia pada saat itu, sehingga hubungan kerjasama keamanan yang terjalin antara Jepang dengan Amerika Serikat diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi Jepang, karena memiliki kekuatan pendukung yang dapat digunakan sebagai pertahanan diri dari ancaman Cina.

2. Konsep *Balance of Power*

Balance of power merupakan salah satu konsep tertua dan konsep paling mendasar dalam studi hubungan internasional. *Balance of power* lahir dari asumsi realis yang menganggap bahwa dunia internasional itu anarkis. Konsep ini membahas tentang

penyeimbangan kekuatan antar negara di dalam sistem internasional, dimana proses penyeimbangan ini dianggap mampu untuk menjaga stabilitas hubungan antar negara. Glenn Snyder menyebutkan bahwa *balance of power* merupakan sebuah konsep yang menjadi inti dari hubungan internasional (Snyder, 1961). Dalam dunia yang anarki, negara dipaksa untuk meningkatkan kekuatan mereka, karena jika mereka tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan, maka mereka harus tunduk pada kehendak negara lain dan kehilangan keamanan serta kemakmuran mereka. Oleh karena itu, persaingan untuk mendapatkan kekuasaan sudah menjadi keadaan yang alami dalam politik internasional (T. V. Paul, 2004).

Konsep *balance of power* memandang bahwa negara selalu berupaya untuk dapat bertahan sebagai entitas yang berdaulat. Dalam sistem internasional yang anarkis ini, *power* menjadi instrumen utama karena *balance of power* memiliki prinsip “Mempersenjatai diri sendiri agar merasa aman”. Oleh karena itu, negara berusaha untuk dapat selalu meningkatkan *power*-nya agar tidak diserang dan diancam oleh negara lain. *Balance of power* menegaskan bahwa keseimbangan kekuatan antar negara itu perlu untuk menghindari ancaman dan serangan dari negara lain. Kaum realis percaya bahwa keseimbangan kekuatan akan membuat dunia internasional dipenuhi dengan kedamaian. Hal ini terjadi karena suatu negara akan memikirkan kemungkinan terburuk yang akan diterima jika melakukan serangan kepada negara yang memiliki kekuatan setara atau bahkan lebih.

Konsep yang menjelaskan mengenai keseimbangan kekuatan ini kemudian sangat berkaitan dengan respon yang diberikan oleh Jepang terhadap upaya Cina dalam meningkatkan kapabilitas militernya. Dari segi pandang realis, peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Cina dapat memicu ketidakstabilan hubungan bilateral kedua

negara, bahkan dapat memicu sebuah peperangan, terlebih lagi kedua negara terlibat dalam konflik sengketa kepulauan *Senkaku*. Meskipun Jepang tidak dapat melakukan penyerangan secara langsung terhadap Cina, namun Jepang ikut serta dalam meningkatkan kekuatan militer nasionalnya, salah satunya adalah dengan meningkatkan anggaran belanja militernya. Meskipun Jepang menyatakan bahwa kebijakannya menaikkan anggaran militer dimaksudkan sebagai pertahanan nasional, namun jika diamati lebih dalam, maka dapat terlihat bahwa kebijakan Jepang tersebut merupakan bagian dari respon yang dilakukan oleh Jepang terhadap peningkatan kapabilitas militer Cina (Muhamad, 2009).

E. Hipotesis

Peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Cina telah memunculkan respon dari Jepang sebagai negara tetangga yang juga terlibat konflik dengan Cina dalam sengketa kepulauan *Senkaku*. Respon Jepang terhadap kebijakan Cina tersebut adalah mempererat hubungan aliansi keamanannya dengan Amerika Serikat untuk membendung ancaman yang datang dari Cina, serta melakukan peningkatan kapabilitas militer dengan menaikkan anggaran belanja militer agar kekuatan yang dimilikinya dapat mengimbangi kekuatan militer Cina.

F. Jangkauan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai jangkauan penelitian dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Hal ini didasari oleh Cina yang semakin gencar meningkatkan anggaran belanja militernya. Selain itu pada tahun 2016, Cina mengambil kebijakan reformasi militer yang mana jumlah tentaranya akan dikurangi sebanyak 300.000 personil dengan tujuan untuk menciptakan tentara profesional yang siap tempur.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menekankan pada sumber kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dianalisis menggunakan kerangka konseptual yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data valid yang memberikan informasi mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Data-data merupakan data valid yang didapatkan dari media cetak berupa buku, jurnal, surat kabar, laporan, majalah, dan dokumen-dokumen lainnya. Selain itu, data juga didapatkan dari media internet seperti situs resmi, situs berita, ataupun situs lain yang terkait dan dapat mendukung proses penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

BAB I

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual yang digunakan, hipotesis, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Bab ini menjelaskan tentang keamanan kawasan Asia Timur Pasca Perang Dunia II dan rivalitas yang terjadi antara negara-negara di kawasan Asia Timur, khususnya konflik bilateral yang terjadi antara Jepang dengan Cina. selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai kebijakan keamanan Jepang Pasca Perang Dunia II.

BAB III

Bab ini membahas mengenai Cina yang meningkatkan kapabilitas militernya secara terus menerus sehingga membuat Jepang sebagai negara tetangga sekaligus sebagai negara yang memiliki konflik sengketa dengannya merasa semakin terancam.

BAB IV

Bab ini menjelaskan mengenai respon yang diberikan Jepang terhadap peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Cina. Bab ini menganalisis tentang upaya Jepang untuk membangun keseimbangan kekuatan dengan Cina dengan mempererat aliansi militernya Bersama Amerika Serikat, serta melakukan peningkatan jumlah anggaran militer.

BAB V

Bab kelima atau bab terakhir ini merupakan penutup yang berisi rangkuman dari seluruh penelitian dan penjelasan yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya.